

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Dalam memahami dan mengetahui penelitian yang dilakukan selanjutnya peneliti berusaha menyampaikan kerangka atau landasan teori yang digunakan terkait topik pembahasan, mengkaitkan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan menggambarkan kerangka penelitian.

2.1.1. Konsep Pertahanan Negara

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata konsep mempunyai dua arti pertama diartikan sebagai suatu rancangan dasar dari sebuah tulisan. kedua konsep diartikan sebagai suatu ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Dengan demikian konsep dapat diartikan sebagai suatu rancangan dasar atau suatu ide yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pertahanan berasal dari kata tahan yang berarti tetap dalam keadaan, atau tetap dalam kedudukannya. Maka dengan demikian pertahanan berarti mengupayakan supaya tetap tidak berubah dari keadaan semula, atau menjaga dan melindungi supaya selamat. Sedangkan pengertian pertahanan negara dalam UU No.34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 1 ayat 5 adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Menurut Harjomataram Pertahanan Nasional adalah daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi semua tantangan dari dalam atau di luar, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan nasional hidup.

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Usaha pertahanan negara tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan adanya dinamika bentuk ancaman yang dihadapi. Perkembangan lingkungan strategis senantiasa membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman nonmiliter. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman.

Sifat pertahanan negara adalah segala upaya adalah pertahanan pelaksanaan universal yang didasarkan pada realisasi hak-hak dan kewajiban warga negara dan kepercayaan pada kekuatan kita sendiri. Pertahanan nasional dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan sejak dini dalam sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional adalah pasukan gabungan (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayah, perlindungan orang dan/ atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri. Dalam bahasa militer, pertahanan adalah sarana untuk memastikan unit perlindungan yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya, tentang cara-cara untuk mempertahankan diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal, *action*, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/balasan.

Dalam UU Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara, terdapat dua perspektif ancaman terhadap NKRI yakni ancaman militer dan

nonmiliter. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan di dukung komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan di dukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Berdasarkan definisi tersebut, maka peneliti memberikan sintesa bahwa pertahanan negara adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Pertahanan nasional dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan pasukan gabungan dari sipil dan militer, yang memiliki perspektif perlindungan terhadap ancaman militer dan nonmiliter. Sistem pertahanan negara mengutamakan peran TNI sebagai komponen utama, yang didukung oleh komponen cadangan dan pendukung.

2.1.2. Ekonomi Pertahanan

Ekonomi pertahanan merupakan suatu studi terhadap alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilisasi yang diaplikasikan pada topik-topik yang berhubungan dengan pertahanan. Termasuk di dalamnya pengeluaran-pengeluaran pertahanan, baik domestik maupun internasional, serta variabel-variabel ekonomi makro seperti tenaga kerja, output, dan pertumbuhan. Cakupan lain adalah dimensi ekonomi mikro, misalnya analisis dari industri dasar pertahanan, program-program kolaboratif, pergeseran, serta pembentukan harga dan keuntungan dari kontrak militer.

Ekonomi pertahanan berasal dari dua kata penting yang memiliki pengertian masing-masing yaitu ekonomi dan pertahanan. Terdapat perbedaan konsep yang menonjol antara ekonomi dan pertahanan. Perbedaan utama terletak pada watak dari kedua konsep tersebut yaitu, ekonomi mengutamakan “kedaulatan terletak pada kebutuhan manusia yang tidak terbatas”, sedangkan watak pertahanan adalah “kedaulatan ada

di tangan negara". Hal ini memberikan suatu konsekuensi: "Jika disepakati untuk menghilangkan kegiatan ekonomi berarti menegasikan hakikat manusia, dan jika menghilangkan kegiatan pertahanan berarti menafikan kehadiran negara". Karena itu perlu menghubungkan kedua watak yang berbeda itu sehingga keduanya berhubungan erat dan saling melengkapi.

Untuk melihat ekonomi dan pertahanan perlu dilihat konsep masing-masing dimana keduanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan suatu negara dapat ditingkatkan melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pemerintah akan dapat melaksanakan berbagai program yang dapat merangsang pertumbuhan apabila kondisi negara dalam keadaan aman. Dengan demikian untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerintah juga berkewajiban untuk mewujudkan keamanan nasional. Keamanan nasional merupakan suatu kondisi atau keadaan yang menggambarkan terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan, baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Keamanan nasional juga bisa diartikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer dan politik serta pengembangan diplomasi.

Salah satu penjelasan yang komprehensif tentang ekonomi pertahanan dapat ditemukan dalam buku "*The Economics of Defense*" yang ditulis oleh Todd Sandler dan Keith Hartley (Sandler et al., 2017). Buku ini memberikan analisis mendalam tentang sejumlah isu yang muncul dalam konteks ekonomi pertahanan, termasuk dampak pertumbuhan ekonomi dari pengeluaran pertahanan, efisiensi penggunaan sumber daya dalam industri pertahanan, dan keberlanjutan keuangan pertahanan.

Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan juga harus dapat menciptakan rasa aman dan nyaman di antara para individu maupun kelompok dalam menjalankan kegiatannya agar mereka dapat meningkatkan utilitasnya secara maksimal. Untuk menciptakan rasa aman tersebut perlu pertahanan untuk mengeliminir ancaman yang dihadapi

suatu negara. Perlindungan negara yang diberikan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah diartikan sebagai perlindungan keamanan kepada segenap warga negara dan semua wilayah beserta seluruh sumber daya yang ada di dalamnya.

Isu-isu pertahanan yang relevan dalam ekonomi pertahanan diantaranya adalah efek dari pengeluaran pertahanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dampak dari kebijakan industri pada sektor pertahanan dan sebaliknya, implikasi dari konversi sumber daya manusia, studi akan konflik dan pengrusakan, kebijakan implikasi dari alokasi wilayah dengan atau tanpa senjata, analisis aliansi, dampak dan disain kontrak dalam efisiensi pengadaan, studi mengenai perlombaan persenjataan dan stabilitas, serta analisis terhadap aturan-aturan perdagangan senjata. Teori ini memiliki relevansi dengan aspek penelitian ruang lingkup kajian ekonomi pertahanan lebih spesifik dijelaskan dengan adanya pengeluaran militer, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi negara ASEAN.

Dari berbagai pengertian ekonomi pertahanan tersebut, peneliti memberikan sintesa bahwa ekonomi pertahanan adalah studi tentang alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilisasi yang diterapkan pada topik-topik yang berhubungan dengan pertahanan. Ini mencakup pengeluaran pertahanan, variabel ekonomi makro seperti tenaga kerja, *output*, dan pertumbuhan, serta dimensi ekonomi mikro seperti industri pertahanan, program kolaboratif, pergeseran, dan harga kontrak militer. Ekonomi pertahanan memiliki perbedaan konsep antara ekonomi (menekankan kebutuhan manusia) dan pertahanan (menekankan kedaulatan negara), namun keduanya saling melengkapi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Keamanan nasional juga penting dalam meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan harus menciptakan rasa aman dan nyaman bagi individu dan kelompok. Buku "*The Economics of Defense*" memberikan analisis mendalam tentang isu-isu ekonomi pertahanan, sementara isu-isu yang

relevan termasuk dampak pengeluaran pertahanan terhadap pertumbuhan ekonomi, kebijakan industri, konversi sumber daya manusia, dan analisis konflik dan pengrusakan.

2.1.3. Pengeluaran Militer atau *Military Spending*

Military spending atau pengeluaran militer atau biaya pemeliharaan suatu organisasi militer merupakan salah satu isu dalam ilmu Ekonomi Pertahanan yang telah banyak menjadi fokus penelitian. Pengeluaran militer sebagai “ukuran input” yang merupakan agregasi pembayaran untuk tentara dan pihak-pihak lainnya terkait angkatan bersenjata regular suatu negara, untuk barang-barang yang dibeli oleh angkatan bersenjata, dan jasa-jasa yang dibeli dari warga sipil, dalam suatu periode waktu, biasanya selama satu tahun (Bader dalam Putri et al., 2018). Selain itu, pengeluaran militer juga seringkali digunakan sebagai ukuran output, karena tidak ada indikator untuk mengukur kekuatan militer. Pengeluaran militer merupakan isu yang masih menjadi perdebatan oleh banyak kalangan, hal tersebut dikarenakan penggunaan pengeluaran militer sebagai ukuran kekuatan militer banyak dilakukan dalam berbagai perbandingan internasional. Pengeluaran militer juga digunakan dalam aliansi-aliansi militer untuk mengukur “kontribusi” dari anggota terhadap aliansi tersebut (Putri et al., 2018).

Biaya *input* sektor militer dapat dianggap sebagai biaya peluang (*opportunity cost*) untuk pengeluaran di sektor-sektor lain, yang bersifat sipil. Hal ini menunjukkan model *guns versus butter*, yaitu model kurva kemungkinan produksi dalam makro ekonomi yang menunjukkan hubungan antara investasi negara dalam barang pertahanan dan barang sipil. Dalam model ini, suatu negara harus memilih antara dua pilihan ketika sumber-sumber dayanya terbatas, entah untuk membeli guns (pertahanan atau militer) atau butter (produksi barang-barang sipil) (Putri et al., 2018).

Pengeluaran militer merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam kebijakan fiskal yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian di suatu negara serta menjaga keamanan nasional di negara tersebut (Putri

et al., 2018). *Military spending* akan menyebabkan tingginya *Malmquist Index* (MPI) yang menandakan jika *military spending* dapat meningkatkan perekonomian di negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) melakukan penelitian dengan lokus di Korea Selatan dan Malaysia jika terdapat hubungan pengaruh antara pertumbuhan GDP dengan *military spending*, namun hal tersebut tidak berpengaruh di Saudi Arabia dan Iran. *Pengeluaran Militer* memiliki dampak negatif kepada real income dari suatu negara (Putri et al., 2018). Pengaruh antara *Pengeluaran Militer* dengan pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan apabila *Pengeluaran Militer* mengalami kenaikan akan menyebabkan adanya kemajuan teknologi yang akan berdampak pada perekonomian di Korea Selatan (Putri et al., 2018).

Pengeluaran militer dan persentase pengeluaran militer dalam PDB menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena telah menjadi ukuran beban relatif dari sektor militer yang penting dalam berbagai penelitian. Informasi pengeluaran digunakan oleh berbagai penelitian. Informasi pengeluaran digunakan oleh berbagai pengguna, termasuk pemerintah, diplomat, peneliti akademik, dan mahasiswa, organisasi non pemerintah, organisasi internasional seperti Bank Dunia dan IMF, jurnalis dan public secara umum. Data pengeluaran militer digunakan untuk berbagai tujuan, sebagaimana yang disampaikan oleh Stockholm International Peace and Research Institute (SIPRI) sebagai berikut:

1. Mengkaji beban ekonomi dari angkatan bersenjata suatu negara terhadap perekonomian negara tersebut;
2. Mengkaji prioritas utama pemerintah dengan cara membandingkan pengeluaran militer dengan pengeluaran pada sektor-sektor lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan, dan perubahan pada tingkat relatif pengeluaran-pengeluaran tersebut terhadap waktu;
3. Mengkaji orientasi suatu negara sebagai relatif damai atau militeristik, atau sebagai ukuran bagaimana negara tersebut

memandang berbagai ancaman keamanan dan tantangan yang mungkin mereka hadapi;

4. Memberi indikasi kasar tingkat relative kapabilitas militer atau kekuatan dari berbagai negara;
5. Melaksanakan penelitian statistik terkait pengeluaran militer secara lintas negara dan/atau lintas waktu terhadap variabel-variabel ekonomi, politik, dan keamanan lainnya.

Mengacu pada Hartley & Sandler (1995), dalam ilmu ekonomi makro, ilmu ekonomi pertahanan merupakan studi tentang alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilisasi yang diterapkan pada topik-topik yang berkaitan dengan pertahanan. Ada tiga pelaku utama dalam kegiatan ekonomi di suatu negara, yaitu pemerintah, perusahaan, dan rumah tangga (Goode, 1984). Kontribusi jenis belanja pertahanan terhadap keamanan sebagai ukuran struktur belanja pertahanan sejalan dengan metode pengukuran struktur ekonomi Yotopoulos dan Nugent (1976).

Dalam kajian ekonomi, ekonomi pertahanan merupakan disiplin ilmu yang relatif baru, dimulai oleh Hitch dan McKean dalam artikel berjudul *The Economics of Defense in the Nuclear Age* pada tahun 1960, yang menyatakan bahwa masalah pertahanan negara adalah ekonomi (Hartley, 2007). Struktur belanja militer dalam APBN terdiri dari belanja rutin, belanja barang, dan belanja modal. Hal tersebut menunjukkan perubahan kontribusi belanja konsumsi, belanja investasi tidak langsung, dan belanja investasi langsung dari pemerintah. Struktur belanja negara semakin berkembang ke arah efisiensi belanja, terutama melalui penghematan belanja rutin dan belanja barang (Kemenkeu, 2011).

Semakin besar skala ekonomi, jumlah penduduk akan mengikuti kondisi geografis Indonesia, Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga kebijakan pertahanan untuk melindungi kepentingan nasional. Mengacu pada teori perubahan struktural dari Chenery (1979), semakin meningkat kontribusi pengeluaran militer akan meningkatkan stabilitas keamanan. Hal

ini merepresentasikan peningkatan kontribusi belanja rutin, belanja barang, dan belanja modal sebagai bentuk transformasi struktural belanja pemerintah dalam anggaran militer. Terkait dengan hal tersebut, stabilitas keamanan merupakan hasil dari peningkatan kapasitas pertahanan dan keamanan nasional, penggunaan sumber daya yang lebih efektif, dan perubahan kebijakan keamanan dan strategi (transformasi sosial atau sektor pertahanan dan keamanan) yang lebih konstruktif (Chang, 2003).

Berdasarkan definisi tersebut, peneliti memberikan sintesa bahwa Pengeluaran militer atau biaya pemeliharaan organisasi militer telah menjadi fokus penelitian dalam ilmu Ekonomi Pertahanan. Pengeluaran militer dapat dianggap sebagai biaya peluang untuk sektor-sektor lain yang bersifat sipil. Pengeluaran militer juga digunakan sebagai ukuran kekuatan militer dalam perbandingan internasional dan aliansi-aliansi militer. Hal ini masih menjadi perdebatan karena penggunaan pengeluaran militer sebagai ukuran kekuatan militer. Pemerintah menggunakan pengeluaran militer sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk memperkuat perekonomian dan menjaga keamanan nasional. Pengeluaran militer memiliki dampak terhadap perekonomian suatu negara, seperti pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Data pengeluaran militer digunakan oleh berbagai pengguna, termasuk pemerintah, peneliti, organisasi non-pemerintah, dan lainnya. Ekonomi pertahanan merupakan disiplin ilmu yang relatif baru dan mempelajari alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilisasi yang berkaitan dengan pertahanan. Struktur belanja militer dalam APBN meliputi belanja rutin, belanja barang, dan belanja modal. Semakin besar skala ekonomi suatu negara, semakin meningkatlah kontribusi pengeluaran militer dalam meningkatkan stabilitas keamanan. Ini mencerminkan transformasi struktural belanja pemerintah dalam anggaran militer.

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan jumlah produksi suatu perekonomian atau perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan dan diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional dalam periode tertentu. Adapun menurut Schumpeter, dalam Putong (2010) bahwa pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan *output* (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat tabungan. Sedangkan menurut beberapa pakar ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi adalah merupakan istilah bagi negara yang telah maju untuk menyebut keberhasilan pembangunannya, sementara itu untuk negara yang sedang berkembang digunakan istilah pembangunan ekonomi.

Model pertumbuhan neo-klasik dipelopori oleh Robert M. Solow pada tahun 1950-an. Model pertumbuhan ini telah diterapkan dalam berbagai studi empiris di banyak negara. Asumsi dasar yang dipakai dalam model ini antara lain, keluaran dihasilkan dari penggunaan dua jenis masukan yaitu modal dan tenaga kerja, perekonomian berada pada kondisi penggunaan tenaga kerja penuh, perekonomian berada dalam kondisi persaingan sempurna.

Menurut pandangan ekonom klasik mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang dan modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, (4) tingkat teknologi yang digunakan (Kuncoro, 2004). Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya.

Menurut Sadono (2000), alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Selain faktor produksi, jumlah angkatan kerja yang bekerja juga akan meningkat

dari tahun ke tahun sehingga apabila dimanfaatkan dengan maksimal maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Produk Domestik Bruto (PDB) Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto apabila ditingkat nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.
2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Produk domestik bruto per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk dalam skala daerah.

Menurut M. Suparko dan Maria R. Suparko ada beberapa macam alat yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu :

1. Produk Domestik Bruto PDB adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam harga pasar. Kelemahan PDB sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi adalah sifatnya yang global dan tidak mencerminkan kesejahteraan penduduk.
2. PDB per Kapita atau Pendapatan Perkapita PDB per kapita merupakan ukuran yang lebih tepat karena telah memperhitungkan jumlah penduduk. Jadi ukuran pendapatan perkapita dapat diketahui dengan membagi PDB dengan jumlah penduduk.
3. Pendapatan Per jam Kerja Suatu negara dapat dikatakan lebih maju dibandingkan negara lain bila mempunyai tingkat pendapatan atau upah per jam kerja yang lebih tinggi daripada upah per jam kerja di negara lain untuk jenis pekerjaan yang sama

Model pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikemukakan oleh Solow menyatakan bahwa persediaan modal dan angkatan yang bekerja dan asumsi bahwa produksi memiliki pengembalian konstan merupakan hal-hal yang mempengaruhi besarnya *output*. Model pertumbuhan Solow juga dirancang untuk mengetahui apakah tingkat tabungan, stok modal,

tingkat populasi dan kemajuan teknologi mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat menggunakan PDRB per kapita sehingga diketahui apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai atau belum. Relevansi teori ini dengan penelitian yang dilakukan adalah output dan pengaruh dari variabel eksogen lainnya berupa pengeluaran pertahanan, inflasi dan aliran modal.

Dari definisi pertumbuhan ekonomi tersebut, peneliti memberikan sintesa bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah produksi dalam suatu perekonomian atau perubahan kondisi ekonomi suatu negara secara berkesinambungan yang diwujudkan sebagai kenaikan pendapatan nasional dalam periode tertentu. Model pertumbuhan neo-klasik yang dikemukakan oleh Solow menyatakan bahwa persediaan modal dan tenaga kerja serta kemajuan teknologi berperan dalam pembentukan output. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diukur menggunakan alat pengukur seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan PDB per kapita. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi sangat berkaitan, dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat menggunakan PDRB per kapita untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.1.5. Teori Kependudukan

Secara kronologis perkiraan bahwa penduduk dunia berkembang secara lambat sampai pada pertengahan abad ke-17. Pada sekitar tahun 1665 penduduk dunia diperkirakan sebesar 500 juta. Penduduk dunia kemudian menjadi dua kali lipat dalam jangka waktu 200 tahun yaitu pada tahun 1850. Pada perkembangannya kemudian dalam jangka waktu 80 tahun penduduk dunia menjadi dua yang kali lipat pada tahun 1930 yakni sebesar dua milyar penduduk. Untuk mencapai dua kali lipatnya kembali

sehingga menjadi empat milyar hanya diperlukan waktu 45 tahun dan pada saat sekarang penduduk telah mencapai tujuh milyar lebih.

Berdasarkan kajian kependudukan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat tersebut disebabkan oleh penemuan obat antibiotik dan program kesehatan masyarakat yang semakin berkembang sejak tahun 1960-an. Teknologi obat-obatan juga semakin berkembang sehingga angka kematian menurun sementara angka kelahiran masih tetap tinggi. Hal inilah yang mendorong terjadinya pertumbuhan penduduk yang makin cepat. Selisih antara kelahiran dan kematian disebut pertumbuhan alamiah (*natural increase*) sedangkan selisih antara migrasi masuk (*in migration*) dan migrasi keluar (*out migration*) disebut migrasi neto (*net migration*) (Rochiadi, 2016).

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia menjelaskan “Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap”. Sedangkan menurut said, yang di maksud dengan penduduk adalah “ jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Penduduk adalah sejumlah manusia baik secara individu maupun kelompok yang menempati wilayah atau negara tertentu minimal dalam jangka waktu satu tahun pada saat dilaksanakan pendataan atau sensus penduduk (Rochiadi, 2016).

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga kerja usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi. Adioetomo teori konfusius membahas hubungan antara jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya jumlah penduduk yang terlampau besar akan menekan standar hidup masyarakat, terutama jika jumlah penduduk dikaitkan dengan luas tanah atau lahan pertanian yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Konfusius menganggap ada suatu

proporsi yang ideal antara luas tanah dan jumlah penduduk. Sebagai pemecah masalah kelebihan penduduk, ia menganjurkan agar pemerintah memindahkan penduduk ke daerah yang masih kekurangan penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan jumlah penduduk, ada tiga faktor yang dominan yaitu tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat migrasi atau perpindahan penduduk (Silastri, 2017).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, peneliti memberikan sintesa bahwa penduduk adalah penduduk adalah semua orang yang tinggal di suatu wilayah geografis selama minimal 6 bulan atau lebih, atau mereka yang tinggal kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud menetap. Penduduk juga dapat diartikan sebagai jumlah orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Penduduk memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi sebagai tenaga kerja, tenaga ahli, dan pimpinan perusahaan. Selain itu, teori Konfusius juga membahas hubungan antara jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Konfusius, jumlah penduduk yang terlalu besar dapat menekan standar hidup masyarakat, terutama jika jumlah penduduk tidak sebanding dengan luas tanah atau lahan pertanian yang tersedia. Konfusius juga menganjurkan agar pemerintah memindahkan penduduk ke daerah yang membutuhkan lebih banyak penduduk sebagai solusi untuk masalah kelebihan penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk adalah tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat migrasi atau perpindahan penduduk.

2.1.5.1. Aspek Kependudukan

Aspek kependudukan meliputi jumlah dan perkembangan, pertumbuhan, persebaran, kepadatan, kualitas, serta mobilitas penduduk.

1. Jumlah dan Perkembangan Penduduk. Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara pada dasarnya dapat dikelaskan sebagai suatu modal atau beban pembangunan yang mana hal ini bisa berdampak baik untuk negara jika di

sertai dengan kualitas yang memadai baik tingkat kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi sangat mendukung terhadap proses pembangunan negara. Namun jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka akan menjadi beban bagi pembangunan dan menjadi suatu hambatan bagi lajunya roda pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan.

2. Pertumbuhan Penduduk. Jumlah penduduk senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Terdapat beragam faktor yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk. Misalkan, peperangan, wabah penyakit atau epidemi, kelaparan dan bencana alam. Selain itu kestabilan negara, peningkatan gizi, dan kesehatan dapat mengakibatkan jumlah penduduk cenderung naik.
3. Persebaran Penduduk berdampak pada berkurangnya lahan perekonomian akibat dijadikan tempat tinggal oleh sekalangan orang yang tinggal diwilayah itu sendiri
4. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu daerah persatuan luas. Kepadatan penduduk di suatu wilayah dapat di cari dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Luas Wilayah}}$$

Dalam demografi, dikenal adanya kepadatan penduduk fisiologis dan kepadatan penduduk agraris.

- a) Kepadatan penduduk fisiologis adalah perbandingan antara jumlah penduduk total dan luas lahan pertanian.
- b) Kepadatan penduduk agraris adalah perbandingan antara jumlah penduduk petani dan luas lahan pertanian.

5. Kualitas Penduduk. Kualitas penduduk adalah suatu penduduk yang memiliki tingkat kemampuan dan mampu memberikan kontribusi nyata untuk negara. Kualitas penduduk bisa di lihat dari fasilitas negara yang memfasilitasinya jika suatu negara mampu memberikan fasilitas yang baik terhadap penduduk nya maka penduduknya akan mempunyai tingkat kualitas yang bagus namun sebaliknya jika fasilitas yang diberikan oleh negara tidak cukup untuk menampung penduduk nya maka hal itu akan berdampak pada ketidak stabilan kualitas penduduk satu dengan yang lainnya. Sebab jika suatu wilayah mempunyai fasilitas yang baik namun di wilayah yang lain tidak baik maka akan ada perbedaan di antaranya.
6. Mobilitas penduduk Mobiltas penduduk merupakan suatu gerakan perubahan dari setiap orang kearah yang lebih baik misalkan si A yang tadinya pengangguran akibat ada rasa keinginan yang kuat dan usaha yang keras si A mampu bekerja dan bisa menghasilkan uang. Dan hal ini bisa di sebut sebagai mobilisasi penduduk yang artinya tindakan untuk bergerak.

2.1.6. Teori Ekonomi Politik

Teori Konflik Dalam Ekonomi Politik (*Conflict Theory*). Teori ini mengatakan bahwa keputusan ekonomi tidak hanya didasarkan pada keputusan rasional yang didorong oleh kepentingan ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh pertentangan kepentingan politik yang ada di masyarakat. Dalam konteks keputusan pengeluaran militer, teori ini menjelaskan bahwa keputusan untuk meningkatkan anggaran militer tidak hanya didasarkan pada kebutuhan keamanan nasional semata, tetapi semakin dipengaruhi oleh kepentingan politik dalam pemerintahan. Dalam hal ini, jumlah penduduk yang besar dapat mempengaruhi keputusan

pengeluaran militer karena pemerintah melihat pengeluaran militer sebagai cara untuk memperoleh dukungan politik dari penduduknya.

Negara dengan jumlah penduduk yang besar memiliki kekuatan politik yang lebih besar karena mereka memiliki suara yang lebih besar dalam pemilihan dan dapat membentuk opini politik yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah cenderung mengalokasikan dana yang lebih besar untuk keperluan militer sebagai upaya untuk memastikan kekuatan politik mereka tetap stabil dan memperoleh dukungan dari penduduk. Namun, teori ini juga mengakui bahwa keputusan pengeluaran militer juga dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, seperti produktivitas ekonomi, sumber daya yang tersedia, dan prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian, keputusan pengeluaran militer tidak sepenuhnya bergantung pada faktor politik semata, tetapi merupakan hasil dari kombinasi antara pertimbangan politik dan ekonomi (Babones, 2008)

2.1.7. Teori *Keynesian*

Teori konsumsi *Keynesian* menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Keynes berpendapat bahwa ketika masyarakat memiliki penghasilan yang tinggi, mereka akan cenderung lebih banyak mengkonsumsi barang dan jasa. Konsumsi ini akan merangsang peningkatan permintaan agregat, yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, Keynes juga mengakui adanya pengeluaran pemerintah selain konsumsi sebagai faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pengeluaran militer dipandang sebagai salah satu jenis pengeluaran pemerintah yang dapat memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi. Keynes berargumen bahwa pengeluaran militer akan meningkatkan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor industri terkait, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, teori *Keynesian* juga menegaskan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran militer tidak bersifat kausal. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak secara otomatis akan meningkatkan pengeluaran militer. Hubungan antara keduanya bersifat saling mempengaruhi. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat memberikan sumber daya ekonomi yang lebih besar untuk pemerintah, sehingga memungkinkan mereka untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pengeluaran militer. Di sisi lain, pengeluaran militer yang tinggi juga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat dan penciptaan lapangan kerja di sektor terkait. Dalam teori Keynesian, peran pemerintah dalam menyediakan stimulus ekonomi melalui pengeluaran militer atau pengeluaran pemerintah lainnya sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek (Keynes, 1936).

2.1.8. Teori Prioritas Pengeluaran

Pada dasarnya, teori prioritas pengeluaran ini menyatakan bahwa negara harus lebih mengutamakan pengeluaran untuk sektor-sektor prioritas seperti pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial daripada pengeluaran untuk kepentingan militer. Teori ini memberikan penekanan pada pentingnya memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan memajukan pembangunan negara. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, negara diharapkan dapat memiliki sumber daya yang lebih besar untuk mengalokasikan dana ke sektor-sektor prioritas ini.

Dalam konteks ini, pengeluaran militer akan mendapatkan prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor-sektor prioritas lainnya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dan negara dapat merasakan manfaat langsung dari alokasi dana yang lebih besar pada sektor-sektor publik yang dibutuhkan. Namun, penting juga diketahui bahwa dalam beberapa situasi tertentu, pengeluaran militer juga bisa dianggap sebagai salah satu sektor prioritas. Misalnya, jika negara mengalami

ancaman keamanan yang cukup serius, maka dana untuk pengeluaran militer mungkin perlu ditingkatkan guna memastikan keamanan dan pertahanan negara. Dalam hal ini, teori ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam mengalokasikan dana untuk berbagai sektor prioritas, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat dan situasi keamanan yang ada (Pranata, 2018)

2.1.9. Teori Demokrasi Perdamaian

Teori demokrasi perdamaian, yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, mengatakan bahwa negara-negara yang demokratis cenderung memiliki lebih sedikit pengeluaran militer dibandingkan dengan negara-negara yang otoriter. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pemerintahan yang demokratis lebih cenderung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa keputusan untuk menggunakan kekuatan militer harus melibatkan persetujuan dari publik dan mungkin juga melibatkan proses legislatif. Keterlibatan publik dan proses legislatif ini dapat memperkuat mekanisme pembatasan terhadap pengeluaran militer yang tidak diperlukan.

Kedua, pemerintahan yang demokratis juga sering memiliki struktur yang lebih terdesentralisasi dan pemerintahan yang lebih terkait langsung dengan rakyat. Dalam sistem demokrasi yang baik, pemimpin harus memberikan perhatian bagi kepentingan dan keinginan rakyat secara keseluruhan. Pengeluaran militer yang tinggi dapat mengabaikan kebutuhan dan keinginan rakyat dan oleh karena itu, kurang mungkin terjadi dalam pemerintahan yang demokratis.

Selain itu, pemerintahan yang demokratis juga seringkali lebih terbuka terhadap kerja sama internasional dan pengembangan hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara lain. Kerjasama ini dapat mengurangi risiko konflik antara negara-negara, yang pada gilirannya mengurangi kebutuhan untuk pengeluaran militer yang tinggi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi pada kemantapan pemerintahan dan transformasi menjadi pemerintahan yang demokratis

dapat mengurangi pengeluaran militer negara-negara tersebut. Hal ini karena pemerintahan yang demokratis cenderung melakukan penggunaan kekuatan militer yang lebih bijaksana dan terbatas, dengan fokus pada pertahanan diri dan keamanan nasional, bukan pengaruh atau dominasi militer (Kant, 1991)

2.1.10. Teori Oportunisme Krisis

Pernyataan tersebut mencerminkan teori oportunisme krisis yang menyatakan bahwa dalam situasi krisis, negara-negara cenderung memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan pengeluaran di sektor tertentu, termasuk pengeluaran militer. Namun, dalam kasus pandemi COVID-19, prioritas utama negara-negara adalah upaya pemulihan ekonomi dan mitigasi penyebaran virus secara global. Maka dari itu, pengeluaran militer tidak menjadi prioritas utama dalam menghadapi pandemi ini (Smith, 2017).

2.1.11. Teori Pilihan Rasional

Teori ini mengemukakan bahwa keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok didasarkan pada pemikiran rasional yang mempertimbangkan biaya dan manfaat yang terkait. Dalam konteks yang disebutkan, negara-negara ASEAN dipahami sebagai aktor rasional yang memprioritaskan kebutuhan sektor kesehatan dan perlindungan sosial selama pandemi, atas dasar pertimbangan biaya dan manfaat. Teori Pilihan Publik juga menekankan pentingnya kepentingan individu atau kelompok dalam pengambilan keputusan publik. Dalam hal ini, negara-negara ASEAN dianggap memilih untuk mengalokasikan sumber daya dan anggaran mereka untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial sebagai respons rasional terhadap kebutuhan masyarakat selama pandemi yang berdampak luas (Mueller, 2003).

2.1.12. Teori Realisme

Teori Realisme: Teori realisme menyoroti pentingnya kekuatan militer dalam hubungan internasional. Menurut teori ini, negara-negara cenderung memperkuat kekuatan militer mereka untuk mempertahankan

kepentingan nasional dan menjaga kedaulatan mereka. Dalam konteks negara-negara ASEAN, pengeluaran militer yang tinggi dapat dijelaskan dengan keinginan untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan memastikan kekuatan relatif di tingkat regional, terlepas dari jumlah penduduk. Pengeluaran militer yang tinggi di negara-negara ASEAN mungkin juga mencerminkan persaingan kekuatan dengan negara-negara tetangga atau ancaman keamanan regional (Gilpin, 2001) .

2.1.13. Teori Ketergantungan

Teori Ketergantungan: Teori ketergantungan menekankan pentingnya ketergantungan antarnegara dalam hubungan internasional. Menurut teori ini, negara-negara saling tergantung satu sama lain dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, politik, dan keamanan. Dalam konteks pengeluaran militer negara-negara ASEAN selama pandemi COVID-19, teori ketergantungan dapat menjelaskan bahwa pengeluaran militer tidak tergantung hanya pada jumlah penduduk karena negara-negara ASEAN juga dibentuk oleh ketergantungan dengan negara-negara lain. Faktor-faktor seperti hubungan keamanan regional, afiliasi dengan aliansi pertahanan, atau ketergantungan pada impor senjata dan peralatan militer dari negara-negara lain juga dapat mempengaruhi pengeluaran militer, terlepas dari jumlah penduduk (Keohane, 2005).

2.1.14. Teori Demografi

Salah satu teori demografi yang berkaitan dengan pernyataan ini adalah teori Transisi Demografi. Teori ini mengaitkan perubahan pola kelahiran dan kematian dengan perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara. Teori transisi demografi mengemukakan bahwa dalam tahap awal pembangunan, tingkat kelahiran dan kematian tinggi secara bersamaan sehingga pertumbuhan penduduk rendah dan stabil. Namun, seiring dengan kemajuan ekonomi dan sosial, tingkat kematian menurun lebih cepat dibandingkan dengan tingkat kelahiran, sehingga pertumbuhan penduduk menjadi tinggi.

Dalam konteks pernyataan tersebut, penurunan tingkat kelahiran selama pandemi dapat dikaitkan dengan faktor ekonomi dan ketidakpastian masa depan, yang dapat dianggap sebagai dampak dari situasi ekonomi yang tidak stabil akibat pandemi Covid-19. Namun, penurunan ini tidak secara langsung berdampak pada pengeluaran militer. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk tidak menjadi faktor determinan yang langsung mempengaruhi pengeluaran militer negara-negara ASEAN selama pandemi. Dalam hal ini, teori transisi demografi memberikan pemahaman mengenai pola kelahiran dan kematian serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara (Lee, 2003).

2.1.15. Teori Keamanan Internasional

Teori keamanan internasional yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah teori *balanced threat* (ancaman seimbang). Teori ini menyatakan bahwa negara-negara akan mengalokasikan sumber daya mereka untuk kepentingan keamanan sesuai dengan tingkat ancaman yang dirasakan. Dalam konteks pandemi COVID-19, negara-negara ASEAN menghadapi ancaman langsung terhadap kesehatan dan ketahanan ekonomi mereka. Oleh karena itu, mereka lebih fokus pada upaya penanganan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi daripada pengeluaran militer. Prioritas pengeluaran mereka adalah bersifat jangka pendek, untuk menghadapi ancaman yang ada saat ini. Hal ini sesuai dengan teori *balanced threat*, di mana pengalokasian sumber daya negara-negara ASEAN dipengaruhi oleh tingkat ancaman yang dirasakan saat ini (Acharya, 2017).

2.1.16. Teori *Balanced Threat*

Teori *balanced threat* (Ancaman seimbang) menyatakan bahwa negara-negara akan mengalokasikan sumber daya mereka untuk kepentingan keamanan sesuai dengan tingkat ancaman yang mereka rasakan. Dalam konteks pandemi COVID-19, negara-negara ASEAN lebih memprioritaskan upaya penanganan krisis kesehatan dan pemulihan

ekonomi daripada pengeluaran militer. Ancaman kesehatan dan ketahanan ekonomi yang langsung dihadapi oleh negara-negara tersebut menjadi prioritas utama dalam pengalokasian sumber daya mereka, karena memiliki dampak yang signifikan dalam jangka pendek (Holsti, 1991).

2.1.17. Teori *Neomalthusian*

Teori *neomalthusian* sesuai dengan pernyataan tersebut adalah bahwa pertumbuhan populasi yang tinggi akan mengakibatkan krisis sumber daya yang serius. Hal ini terjadi karena sumber daya alam dan manusia yang tersedia tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Dalam konteks pandemi COVID-19, teori ini dapat diterapkan dengan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memberikan tekanan tambahan pada anggaran yang sudah terbatas. Dalam hal ini, pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan terbatasnya sumber daya kesehatan seperti fasilitas medis dan tenaga medis yang memadai untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai bagi seluruh populasi. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk dapat membuat akses terhadap sumber daya lain seperti pangan dan air minum terbatas, yang dapat menyebabkan krisis pangan dan kekurangan air bersih. Oleh karena itu, teori *neomalthusian* dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana pertumbuhan populasi yang tinggi dapat berdampak pada krisis sumber daya dalam konteks pandemi COVID-19 (Cohen, 2003).

2.1.18. Teori Pengeluaran Publik dan Kebijakan Fiskal

Teori pengeluaran publik adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Teori ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks pernyataan tersebut, pengeluaran pemerintah yang meningkat untuk jaminan sosial, perawatan kesehatan, dan pemulihan ekonomi dapat memiliki efek yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan meningkatkan pengeluaran dalam sektor-sektor tersebut, pemerintah dapat memberikan stimulus kepada masyarakat dan sektor-sektor yang terdampak krisis, yang pada gilirannya dapat meningkatkan konsumsi dan investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Namun, dalam situasi krisis yang juga melibatkan negara dengan kepadatan penduduk tinggi, pengeluaran publik mungkin memerlukan lebih banyak sumber daya. Hal ini dapat mencakup pengeluaran untuk infrastruktur, transportasi, dan juga pengeluaran untuk militer untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat.

Pada saat yang sama, kebijakan fiskal juga dapat berperan dalam mendukung pengeluaran militer yang lebih tinggi. Kebijakan fiskal melibatkan pengaturan pengeluaran dan pendapatan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Dalam konteks ini, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk meningkatkan pengeluaran militer, misalnya dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pertahanan dan keamanan.

Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional dan masyarakat di tengah situasi krisis, seperti pandemi COVID-19. Dengan memperkuat pertahanan dan keamanan, pemerintah dapat mencegah potensi ancaman dan konflik yang dapat memperburuk situasi krisis yang sedang dihadapi.

Namun, penting untuk diingat bahwa pengalokasian anggaran untuk militer juga harus dipertimbangkan secara hati-hati. Pemerintah harus tetap memprioritaskan kebutuhan mendasar seperti jaminan sosial, perawatan kesehatan, dan pemulihan ekonomi, sehingga pengeluaran untuk militer tidak mengabaikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Stiglitz, 2015).

2.1.19. Teori Domino

Teori domino yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah teori efek domino keamanan. Teori ini menyatakan bahwa ketika satu negara meningkatkan pengeluaran militer atau memperkuat kekuatannya, negara-negara tetangga cenderung merasa terancam dan meningkatkan anggaran

pertahanan mereka sebagai respons. Hal ini bisa menyebabkan spiral keamanan, di mana setiap langkah yang diambil oleh satu negara akan memicu langkah serupa dari negara-negara tetangga lainnya. Akibatnya, kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat terhambat karena sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan ekonomi digunakan untuk kepentingan militer (Schweller, Randall L., 1996).

2.1.20. Teori Keamanan Manusia

Teori keamanan manusia dalam pernyataan tersebut adalah teori yang menekankan pentingnya memprioritaskan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat daripada pengeluaran militer di tengah krisis kesehatan. Selama pandemi COVID-19, banyak negara terpaksa mengalokasikan anggaran yang semula untuk pengeluaran militer ke dalam sektor kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempercepat penanganan pandemi (Gartzke, 2007).

2.1.21. Teori Sumber Daya dan Konflik

Teori sumber daya dan konflik dalam pernyataan tersebut adalah teori yang menyatakan bahwa penurunan sumber daya akibat pandemi dapat mengurangi kemampuan negara-negara untuk meningkatkan pengeluaran militer. Pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan ekonomi global dan menimbulkan tekanan besar pada sektor keuangan negara. Kondisi ini membuat negara-negara sulit untuk meningkatkan pengeluaran militer seiring dengan peningkatan kebutuhan untuk menangani pandemi (Keohane, 2005).

2.1.22. Teori Modernisasi

Teori modernisasi adalah teori yang memandang modernisasi sebagai proses perubahan sosial yang melibatkan pergeseran dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Teori ini berpendapat bahwa modernisasi terjadi melalui kemajuan ekonomi, perkembangan teknologi, pembentukan institusi dan organisasi yang efisien, serta sosialisasi individu dalam nilai-nilai modern. Dalam konteks pernyataan di

atas, teori modernisasi mendukung pandangan bahwa negara-negara yang mengalami proses modernisasi akan cenderung meningkatkan pengeluaran militer mereka sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan. Pengeluaran militer yang meningkat dianggap sebagai refleksi dari kemajuan ekonomi, kemampuan teknologi, serta kebutuhan untuk mempertahankan keamanan dan kekuatan negara di tengah lingkungan internasional yang kompetitif. Dalam teori modernisasi, pengeluaran militer dipandang sebagai indikator penting dari kemampuan dan kekuatan negara dalam mencapai status modern (Inglehart, 2005).

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam tulisan penelitian ini terdapat sebuah penulisan terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yaitu penelitian yang berkaitan dengan analisa anggaran pertahanan berdasarkan jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian terdahulu merupakan salah satu upaya peneliti untuk mencari pembandingan dan salah satu sumber inspirasi untuk peneliti baru, kajian terdahulu yang membantu dalam mengolah dan memosisikan penelitian. Beberapa relevansi penelitian terdahulu tersebut diantaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama, dilakukan oleh M.T. Hirnissa, Muzafar Shah Habibullah, A.H. Baharom (2008) yang membahas mengenai Pengeluaran Militer And Economic Growth In Asean-5 Countries dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran militer dan pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 (Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina). Dalam penelitian ini kami menggunakan lag terdistribusi autoregresi (ARDL) membatasi prosedur pengujian untuk memeriksa hubungan jangka panjang antara pengeluaran militer dan ekonomi pertumbuhan menggunakan data tahunan untuk periode 1965 sampai 2006. Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran militer dan pertumbuhan ekonomi untuk semua negara stasioner setelah

perbedaan pertama menggunakan uji akar unit. Analisis kointegrasi menunjukkan hanya 3 dari 5 negara yang terkointegrasi. Hubungan pengaruh negatif jangka panjang antara pengeluaran militer dan pertumbuhan ekonomi terdeteksi Singapura, Indonesia dan Thailand berjalan dari RGDP ke MILEX. Dengan kata lain, negara-negara ini mengalami perdamaian dividen. Singapura menunjukkan hubungan kausal dua arah karena pengeluaran militer mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan juga mempengaruhi pengeluaran militer. Sedangkan untuk Indonesia dan Thailand terdapat hubungan sebab akibat yang searah berpengaruh karena hanya pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi pengeluaran militer.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Tangguh Chairil, Dedy S. Sinaga, Annisa I. Febrianti (2013) yang membahas tentang Relationship between Pengeluaran Militer and Economic Growth in ASEAN: Evidence from Indonesia dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengeluaran militer adalah public pengeluaran oleh pemerintah yang memiliki pengaruh di luar sumber daya yang dibutuhkan, dan akibatnya di luar sektor pertahanan diri; Indonesia tidak terkecuali. Apakah pengaruhnya positif, negatif, atau tidak signifikan tidak dalam kasus Indonesia, karena Indonesia mau tidak mau harus meningkatkan pengeluaran militer secara bertahap untuk memenuhinya persyaratan MEF. Sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Pothan) Kemhan RI, Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, menjelaskan, MEF akan dipenuhi sekitar tahun 2024 dengan nominal kurang lebih Rp300 triliun. Dia menambahkan bahwa anggaran yang ideal untuk dipenuhi persyaratan pertahanan, terutama di negara maju, sekitar 2 sampai 3 persen dari PDB, sedangkan Indonesia pengeluaran militer hanyalah di bawah 1 persen. Untuk meniadakan kesenjangan ini, Indonesia pengeluaran militer telah meningkat secara bertahap setiap tahun, meskipun demikian dampaknya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Posma Sariguna Johnson Kennedy (2014) yang membahas tentang Tingkat Militerisasi Negara ASEAN Berdasarkan Natural Balance Of Power Militarization Level Of Asean Countries Based On Natural Balance Of Power dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki rata-rata 1,2 % dari kekuatan dunia. Ini menunjukkan kekuatan nasional yang cukup besar. Dengan menyadari bahwa Indonesia termasuk negara yang memiliki kekuatan nasional yang besar melalui sumber daya alam, ekonomi dan populasinya, selain memberikan potensi keuntungan, tetapi juga mengandung ancaman. Sejak tahun 1995 tingkat ancaman Indonesia secara tren meningkat. Bahkan pada tahun 1998-1999 pada saat puncak krisis moneter kekuatan rata-rata lingkungan strategis sedikit lebih besar dari kekuatan militer Indonesia. Di era reformasi, setelah tahun 2004 ancaman potensial dari lingkungan strategis meningkat sedikit lebih besar daripada kekuatan militer Indonesia. Sejak tahun 2004 secara relatif negara-negara di lingkungan strategis Indonesia telah meningkatkan tingkat militerisasinya. Untuk menghadapi ancaman ini, sejak tahun 2012 Indonesia telah mulai meningkatkan anggaran militernya secara signifikan, setelah sangat rendah pada tahun 2008. Jumlah manpower atau tentara Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN, tetapi dibandingkan dengan populasinya melalui rasio tentara terhadap angkatan kerjanya memiliki nilai termasuk rendah, bersama Filipina. Sedangkan Laos, Brunei dan Singapura memberikan gambaran sebaliknya, negara-negara ini memiliki rasio yang tinggi. Secara absolut anggaran pertahanan di ASEAN meningkat. Namun, dari proporsinya dengan GDP, jumlah anggaran pertahanan di kawasan ASEAN cenderung menurun. Untuk Indonesia, besaran nominal anggaran pertahanannya tertinggi, tetapi dibandingkan dengan GDP-nya memiliki nilai yang termasuk rendah bersama Laos. Sedangkan Singapura memiliki rasio anggaran militer terhadap GDP yang tertinggi di kawasan ASEAN, bahkan tingkat militerisasinya sangat tinggi. Tingkat militerisasi negara ASEAN termasuk

tinggi karena memiliki indeks GMI rata-rata di atas 500, hanya Indonesia yang memiliki indeks di bawah 500 (paling rendah di kawasan ASEAN), dan Filipina. Tingkat militerisasi secara keseluruhan mulai menurun di kawasan ASEAN, namun secara absolut, keseluruhan keseimbangan militer pada negara-negara Asia masih mengalami tren meningkat untuk beragam tujuan.

Penelitian keempat, dilakukan oleh Jaka Sastrawan Rk, Ming-Hung Yao (2018) yang membahas tentang *The Empirical Analysis Of The Relationship Between Pengeluaran Militer And Economic Growth In Asean Countries* dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh militer untuk pertumbuhan ekonomi di sembilan ASEAN negara. Meskipun, menggunakan pengeluaran militer untuk merangsang pertumbuhan ekonomi adalah topik yang bisa diperdebatkan, tapi tren pengeluaran militer di ASEAN selalu meningkat secara umum dari tahun ke tahun. Mereka berharap dengan meningkat militer dapat memberi mereka lingkungan yang lebih aman kegiatan ekonomi mereka. Itu memberi kita tanda peran penting dari pengeluaran militer. Hasil dari empat uji akar unit panel menunjukkan hal itu akar unit ada dalam kasus level $I(0)$, namun, setelah *first different* $I(1)$ diambil, semua variabel ditunjukkan ke stasioner. Sedangkan dari sebelas tes kointegrasi Pedroni, menolak hipotesis nol tidak ada kointegrasi selama enam tes. Dengan keputusan mayoritas, kita dapat menyimpulkan hubungan kointegrasi ada. Lebih-lebih lagi, FMOLS dan DOLS yang kita gunakan untuk pengecekan jangka panjang menunjukkan pengeluaran militer, populasi usia produktif dan pembentukan modal tetap bruto memiliki efek jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Terakhir, pengaruh tes yang didasarkan pada model koreksi kesalahan panel menunjukkan bahwa ada pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel Sebagaimana diketahui bahwa pengeluaran militer akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung mempengaruhi sektor lainnya seperti tenaga kerja dan investasi.

Penelitian kelima, dilakukan oleh Endro Tri Susdarwono (2020) yang membahas tentang Tata Kelola Pemerintahan Terkait Alternatif SDM Pertahanan Dalam Rangka Efisiensi Anggaran Pertahanan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terkait tata kelola pertahanan terkait sumber daya manusia pertahanan (*management of defense human resource/ human capital management*), terdapat potensi SDM pertahanan yang hingga kini selain masih belum diatur dalam peraturan perundangan, yang akhirnya manajemen SDM pertahanan pun belum memadai. Sedangkan Manajemen SDM pada hakikatnya merupakan siklus mulai dari rekrutmen sampai dengan pemisahan - maka manajemen SDM pertahanan sebenarnya harus terus menerus dilakukan. Maka dengan demikian, manajemen SDM pertahanan terhadap SDM yang ada (personil TNI) harus dilakukan secara terusmenerus, mulai dari rekrutmen, pendidikan, penggunaan, kesejahteraan, dan pemisahan. TNI adalah komponen utama dalam sistem pertahanan negara didukung dengan Komcad dan Komduk. Dua amanat dari UU pertahanan negara yang belum dapat diselesaikan adalah Rancangan UU Komcad dan Rancangan UU Komduk. Dan berdasarkan pada uraian tentang manajemen sumber daya manusia, maka sangat penting sekali rancangan UU ini di selesaikan.

Penelitian keenam, dilakukan oleh Caesar Pratama, Yudi Sutrasna, IDK Kerta Widana (2020) yang membahas tentang Analisis Jenis Komoditas Unggulan Dan Pengaruh Anggaran Pertahanan, Produk Domestik Bruto Indonesia, Nilai Tukar Rupiah, Serta Harga Komoditas Terhadap Nilai Ekspor Komoditas Unggulan Dalam Asean Japan Economic Partnership (AJCEP) dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Pengaruh Jenis Komoditas Unggulan Indonesia dalam Perdagangan Indonesia-Jepang Periode 2001 – 2017 adalah sebagai berikut : 1. Lima komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dengan nilai RCA tertinggi yaitu Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy

(Nikel) (Kode HS : 7501) dengan nilai RCA 25.58 , Woven fabrics of synthetic staple fibres (Kain Tekstil) (Kode HS : 5513) dengan nilai RCA 22.73, Nutmeg, mace and cardamoms (Buah Pala) (Kode HS : 0908) dengan nilai RCA 17.95, Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip (Karet Alam) (Kode HS : 4001) dengan nilai RCA 17.01, Uncoated paper and paperboard (Kertas kosong) (Kode HS : 4802) dengan nilai RCA 15.76. Berdasarkan nilai tersebut Nikel merupakan komoditas yang paling memiliki keunggulan komparatif. Sedangkan Nikel, Buah Pala, dan Karet Alam merupakan tiga komoditas barang mentah yang memiliki nilai RCA tertinggi.

Penelitian ketujuh, dilakukan oleh Sudeshna Ghosh (2021) yang membahas tentang *Analysing the nexus between income inequality and Pengeluaran Militer in top ten defence expenditure economies* dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Studi ini berusaha untuk mengeksplorasi hubungan antara pengeluaran militer dan pendapatan ketimpangan (dijelaskan oleh ukuran ketimpangan yang berbeda) yaitu ukuran ketimpangan Gini, ukuran ketimpangan Theil dan pangsa pendapatan 20 persen Teratas, dalam satu set panel sepuluh pembelanja pertahanan teratas yaitu AS, Cina, India, Prancis, Rusia, Inggris, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Italia selama 1990 hingga 2015. Pilihan jangka waktu dipengaruhi oleh terbatasnya ketersediaan data tahunan untuk variabel ketimpangan. Sedikit studi dalam literatur telah mengeksplorasi bagaimana pengeluaran militer berdampak pada ketimpangan, khususnya ukuran ketimpangan yang berbeda dalam pengamatan panel.

Penelitian kedelapan, dilakukan oleh Iman Agung Ramadhan, Agus Tri Basuki (2022) yang membahas tentang *Factors Affecting Pengeluaran Militer in ASEAN* dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian di atas, hal tersebut dapat terjadi menjelaskan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi bertanda positif berpengaruh pada Pengeluaran Militer. Nilai yang diprofilkan adalah

0,0034 pada nilai profitabilitas kurang dari 0,05 sehingga Economic. Variabel pertumbuhan berpengaruh terhadap tingkat Pengeluaran Militer. Hasil penelitian tentang Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Militer didukung oleh teori dari Ginting bahwa pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi di masyarakat, jadi bahwa semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, semakin sejahtera masyarakatnya masyarakat akan meningkat yang memberikan efek positif pada Pengeluaran Militer (Ginting, 2008). Berdasarkan hasil penelitian di atas, hal tersebut dapat terjadi menjelaskan bahwa variabel Pengangguran bertanda negative berpengaruh pada Pengeluaran Militer. Nilai yang diprofilkan adalah 0,0231 pada nilai profitabilitas kurang dari 0,05 sehingga Variabel Pengangguran berpengaruh terhadap Tingkat Militer Pengeluaran.

Penelitian kesembilan, dilakukan oleh Muhtar Rifai, Ansar Tutu, Mulyani, Andi Sunra, Panji Suwarno (2022) yang membahas tentang Pengaruh Anggaran Pertahanan Dan Minimum Essential Force Terhadap Postur Tentara Nasional Indonesia (Studi Di Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan) dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa poin-poin kesimpulan sebagai berikut: (1) Anggaran Pertahanan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Postur Tentara Nasional Indonesia. Tidak signifikan sebagai hasil uji hipotesis ini berarti kesimpulan pada sampel tidak berlaku pada populasi yang lebih luas (tidak dapat digeneralisasikan) dan hanya berlaku pada sampel itu sendiri. (2) Minimum Essential Force berpengaruh positif signifikan terhadap Postur Tentara Nasional Indonesia. (3) Anggaran Pertahanan dan Minimum Essential Force secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Postur Tentara Nasional Indonesia.

Penelitian kesepuluh, dilakukan oleh Saskia Tasnim Utami (2022) yang membahas tentang Keamanan Regional Asia Tenggara Pasca Perjanjian AUKUS dan Implementasinya Pada Ketahanan Wilayah

Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masing-masing individu maupun negara memiliki ideologi dan cara pandang yang berbeda-beda tetapi dalam sisi kemanusiaan sama-sama menghargai perbedaan tersebut sebagai sesama manusia. Perbedaan pandangan dan segala macam perbedaan justru merupakan pengayaan dalam mengisi peradaban dunia. Jangan menilai suatu perbedaan di dalam kehidupan dan masing-masing negara dengan sudut pandang yang sempit. Keberadaan diri manusia yang terbangun dan terbentuk tentu disebabkan dengan berbagai asupan gizi yang masuk. Jika pemanfaatan tersebut menyimpang dari tujuan yang ditetapkan dalam kemanusiaan tentu hal ini melemahkan harkat martabat manusia karena melanggar hak asasi manusia, hak hidup dalam keadaan perang itu terancam.

Peneliti memberikan deskripsi penelitian tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	NAMA PENELITI/JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	M.T. Hirnissa, Muzafar Shah Habibullah, A.H. Baharom (2008) Pengeluaran Militer And Economic Growth In Asean-5 Countries Journal of Suistainable Development Volume 2 No. 2	Kuantitatif	(1) hanya tiga (Indonesia, Thailand, Singapura) dari lima negara yang dianalisis menunjukkan hubungan jangka panjang antara pengeluaran militer dan pertumbuhan ekonomi; (2) Sedangkan untuk kasus Singapura, pengaruhnya dua arah, untuk Indonesia dan Thailand searah dari pengeluaran militer ke pengeluaran ekonomi. pertumbuhan; dan (3) Untuk negara-negara lainnya, (Malaysia dan Filipina), tidak ada hubungan yang berarti terdeteksi	Persamaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang membahas tentang Pengeluaran Militer atau anggaran militer/pertahanan.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan oleh Hirnissa (2008) adalah metode kuantitatif dan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen.

No	NAMA PENELITI/JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Tangguh Chairil, Dedy S. Sinaga, Annisa I. Febrianti (2013) Relationship between Pengeluaran Militer and Economic Growth in ASEAN: Evidence from Indonesia Journal of ASEAN Studies	Kuantitatif	Hasil menunjukkan bahwa pengeluaran militer Indonesia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara, yang kemungkinan besar disebabkan oleh pengembangan modal manusia sebagai akibat dari pengeluaran militer	Persamaan dalam penelitian ini adalah focus penelitian yang menggunakan Pengeluaran Militer atau pengeluaran militer/pertahanan.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan oleh Chairil et al (2013) adalah metode kuantitatif dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen.
3	Posma Sariguna Johnson Kennedy (2014) Tingkat Militerisasi Negara ASEAN Berdasarkan Natural Balance Of Power Militarization Level Of Asean Countries Based On Natural Balance Of Power	Kualitatif	Dari hasil penelitian terlihat bahwa secara absolut tingkat militerisasi negara ASEAN termasuk tinggi, kecuali Indonesia yang sangat rendah, tetapi memiliki kecenderungan menurun. Hal ini harus diwaspadai dan diperhatikan, karena dapat menjadi potensi ancaman akibat kekuatan yang	Persamaan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup anggaran pertahanan dengan natural balance of power.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian Kennedy (2014) menggunakan Natural Power Balance dalam pembahasan tingkat militerisasi negara ASEAN.

No	NAMA PENELITI/JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Proseding Seminar Bisnis & Teknologi ISSN : 2407-6171		tidak seimbang antar negara. Dengan kesadaran tersebut, negara ASEAN dapat saling bekerja sama dan saling mengingatkan sebagai kawan, serta program-program pertahanan dapat ditujukan untuk menjaga pertumbuhan perekonomian nasional dan perdamaian di kawasan.		
4	Jaka Sastrawan Rk, Ming-Hung Yao (2018) The Empirical Analysis Of The Relationship Between Pengeluaran Militer And Economic Growth In Asean Countries	Kuantitatif	Selanjutnya kami melakukan FMOLS (kuadrat terkecil biasa yang dimodifikasi penuh) dan DOLS (kuadrat terkecil biasa dinamis) untuk mengetahui apakah ada pengaruh jangka panjang dari variabel terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik uji FMOLS maupun DOLS menunjukkan bahwa variabel	Persamaan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian yang mengarah pada anggaran pertahanan.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan oleh Sastrawan (2018) adalah metode kuantitatif dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen.

No	NAMA PENELITI/JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	International Journal of Management and Applied Science Volume-4, Issue-10		tersebut memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hasil pengujian VECM menunjukkan bahwa pengeluaran dan investasi militer berpengaruh langsung jangka pendek terhadap PDB. Sementara itu, hasil error correction term menunjukkan bahwa terjadi aliran dua arah antara GDP dan belanja militer. Dari perspektif kebijakan, hasil kami mendukung argumen bahwa pengeluaran militer berpengaruh terhadap ekonomi pertumbuhan.		
5	Endro Tri Susdarwono (2020)	Kualitatif	Pembahasan mengenai sumber daya manusia pertahanan yang diperlukan untuk membangun	Persamaan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian	Perbedaan dalam penelitian ini adalah anggaran pertahanan

No	NAMA PENELITI/JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>Tata Kelola Pemerintahan Terkait Alternatif Sdm Pertahanan Dalam Rangka Efisiensi Anggaran Pertahanan</p> <p>Journal of Government and Politics (JGOP) Vol. 2 No. 2</p>		<p>kekuatan pertahanan meliputi militer aktif, militer wajib atau wajib militer, militer sukarela atau komponen cadangan dan komponen pendukung. Militer aktif dan militer wajib dalam kaitannya dengan kedinasan hampir sama, hanya saja untuk militer wajib dibatas masa baktinya sesuai dengan aturan dari negara. Dalam memperhitungkan sumber daya manusia pertahanan, tidak hanya militer aktif dan wajib militer, tetapi termasuk komponen cadangan dan komponen pendukung. Manajemen SDM pada hakikatnya merupakan siklus mulai dari rekrutmen sampai dengan pemisahan -</p>	<p>dalam membahas anggaran pertahanan.</p>	<p>dikorelasikan dengan tata Kelola pemerintahan dan alternatif SDM pertahanana dalam Upaya efisiensi.</p>

No	NAMA PENELITI/JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>maka manajemen SDM pertahanan sebenarnya harus terus menerus dilakukan. Maka dengan demikian, manajemen SDM pertahanan terhadap SDM yang ada (personil TNI) harus dilakukan secara terus-menerus, mulai dari rekrutmen, pendidikan, penggunaan, kesejahteraan, dan pemisahan. TNI adalah komponen utama dalam sistem pertahanan negara didukung dengan Komcad dan Komduk. Dua amanat dari UU pertahanan negara yang belum dapat diselesaikan adalah Rancangan UU Komcad dan Rancangan UU Komduk. Dan mendasarkan pada uraian tentang manajemen sumber</p>		

No	NAMA PENELITI/JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			daya manusia, maka sangat penting sekali rancangan UU ini di selesaikan.		
6	Caesar Pratama, Yudi Sutrasna, IDK Kerta Widana (2020) Analisis Jenis Komoditas Unggulan Dan Pengaruh Anggaran Pertahanan, Produk Domestik Bruto Indonesia, Nilai Tukar Rupiah, Serta Harga Komoditas Terhadap Nilai Ekspor Komoditas Unggulan Dalam Asean Japan Economic Partnership (AJCEP)	Kuantitatif Deskriptif	Lima komoditas yang memiliki keunggulan komparatif yaitu Bijih Nikel, Kain Tekstil, Buah Pala, Karet Alam, dan Kertas dengan posisi daya saing kategori Retreat untuk komoditas Nikel dan Kertas, sedangkan untuk komoditas Kain Tekstil, Buah Pala, dan Karet alam berada pada posisi daya saing Falling Star. Dilakukan permodelan untuk tiga komoditas tersebut. PDB per kapita riil Indonesia berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai ekspor komoditas Nikel, sedangkan nilai tukar Rupiah terhadap Yen, harga	Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai anggaran pertahanan.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan oleh Pratama et al (2022) adalah kuantitatif dengan variabel independent jenis komoditas unggulan, anggaran pertahanan, PDB, nilai tukar rupiah dan harga komoditas serta nilai ekspor komoditas sebagai variabel dependen dengan ruang lingkup ASEAN Japan Economic Partnership (AJCEP)

No	NAMA PENELITI/JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jurnal Ekonomi Pertahanan Volume 6 Nomor 1		komoditas Nikel, dan anggaran pertahanan Indonesia berpengaruh signifikan positif terhadap nilai ekspor komoditas Nikel. PDB per kapita riil tidak berpengaruh terhadap nilai ekspor komoditas Karet Alam, nilai tukar rupiah terhadap Yen berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai ekspor komoditas karet alam, sedangkan harga komoditas karet alam dan anggaran pertahanan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai ekspor komoditas karet alam. Untuk komoditas Buah Pala hanya dipengaruhi oleh PDB per kapita riil signifikan positif dan anggaran pertahanan signifikan negatif.		

No	NAMA PENELITI/JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	<p>Sudeshna Ghosh (2021)</p> <p>Analysing the nexus between income inequality and military expenditure in top ten defence expenditure economies</p> <p>Springer Nature B.V. 2021</p>	Kuantitatif	<p>Temuan menyoroti bahwa dampak pengeluaran militer pada ketimpangan pendapatan negatif. Temuan didasarkan pada teknik estimasi panel generasi kedua. Kenaikan satu persen dalam pengeluaran militer yang dieksplorasi melalui Dynamic Common Correlated Effects Estimation mengurangi ketidaksetaraan Gini sebesar 2,90 persen, berkurang. Ukuran ketimpangan mereka sebesar 0,12 persen dan mengurangi ukuran ketimpangan 20 persen teratas sebesar 11 persen. Temuan ketidaksetaraan yang mengurangi dampak pengeluaran militer dikonfirmasi</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup pembahasan mengenai anggaran pertahanan</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini adalah Ghosh (2021) membahas penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan variabel income inequality terhadap pengeluaran pertahanan pada 10 negara yang menempati posisi teratas dalam hal pertahanan negara.</p>

No	NAMA PENELITI/JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			melalui uji ketahanan alternatif. Namun, ada juga beberapa kesimpulan yang bertentangan, misalnya penerapan fungsi pengeluaran militer non-linier membuat hasilnya sensitif terhadap spesifikasi ketimpangan yang berbeda.		
8	Iman Agung Ramadhan, Agus Tri Basuki (2022) Factors Affecting Pengeluaran Militer in Asean International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS) Volume VI, Issue V	Kualitatif	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan adalah diperoleh bahwa ada dua variabel yang mempengaruhi biaya militer, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Pengangguran adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap biaya militer di 5 Negara Asean. Sedangkan investasi tidak berpengaruh pada	Persamaan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian yang membahas tentang anggaran pertahanan.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah Ramdhan et al (2022) membahas tentang faktor yang mempengaruhi anggaran pertahanan di ASEAN.

No	NAMA PENELITI/JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>pembelanjaan militer. Kawasan ASEAN dalam kondisi aman, begitu bahwa pengeluaran militer di negara ASEAN cukup stabil dari tahun ke tahun. Stabilitas politik dan ekonomi di ASEAN membuktikan bahwa peningkatan investasi tidak mendorong peningkatan yang signifikan dalam pengeluaran militer.</p>		
9	<p>Muhtar Rifai, Ansar Tutu, Mulyani, Andi Sunra, Panji Suwarno (2022)</p> <p>Pengaruh Anggaran Pertahanan Dan Minimum Essential Force Terhadap Postur Tentara Nasional</p>	Kuantitatif	<p>Hasil yang dicapai dalam penelitian ini meliputi, (1) anggaran pertahanan dan minimum essential force secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap postur Tentara Nasional Indonesia, (2) anggaran berpengaruh positif</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup pembahasan penelitian yang mengacu pada anggaran pertahanan.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan oleh Tutu et al (2022) menggunakan metode kuantitatif dengan variabel independent anggaran pertahanan dan MEF</p>

No	NAMA PENELITI/JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indonesia (Studi Di Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan) Jurnal Inovasi Penelitian Vol.2 No.10		dan tidak signifikan terhadap postur Tentara Nasional Indonesia, (3) minimum essential force berpengaruh positif dan signifikan terhadap postur Tentara Nasional Indonesia		serta postur TNI sebagai variabel dependen.
10	Saskia Tasnim Utami (2022) Keamanan Regional Asia Tenggara Pasca Perjanjian AUKUS dan Implementasinya Pada Ketahanan Wilayah Indonesia Jurnal Ketahanan Nasional Volume 28 No. 2	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyeksi kekuatan Perjanjian AUKUS akan mengancam keamanan serta stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Perjanjian AUKUS dapat melemahkan ASEAN untuk melestarikan kawasan bebas nuklir demi perdamaian dan keamanan internasional dengan adanya perjanjian AUKUS ini menjadikan Traktat	Persamaan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup pembahasan tentang ketahanan wilayah Indonesia.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah Utami (2022) membahas tentang perjanjian AUKUS dan keamanan regional.

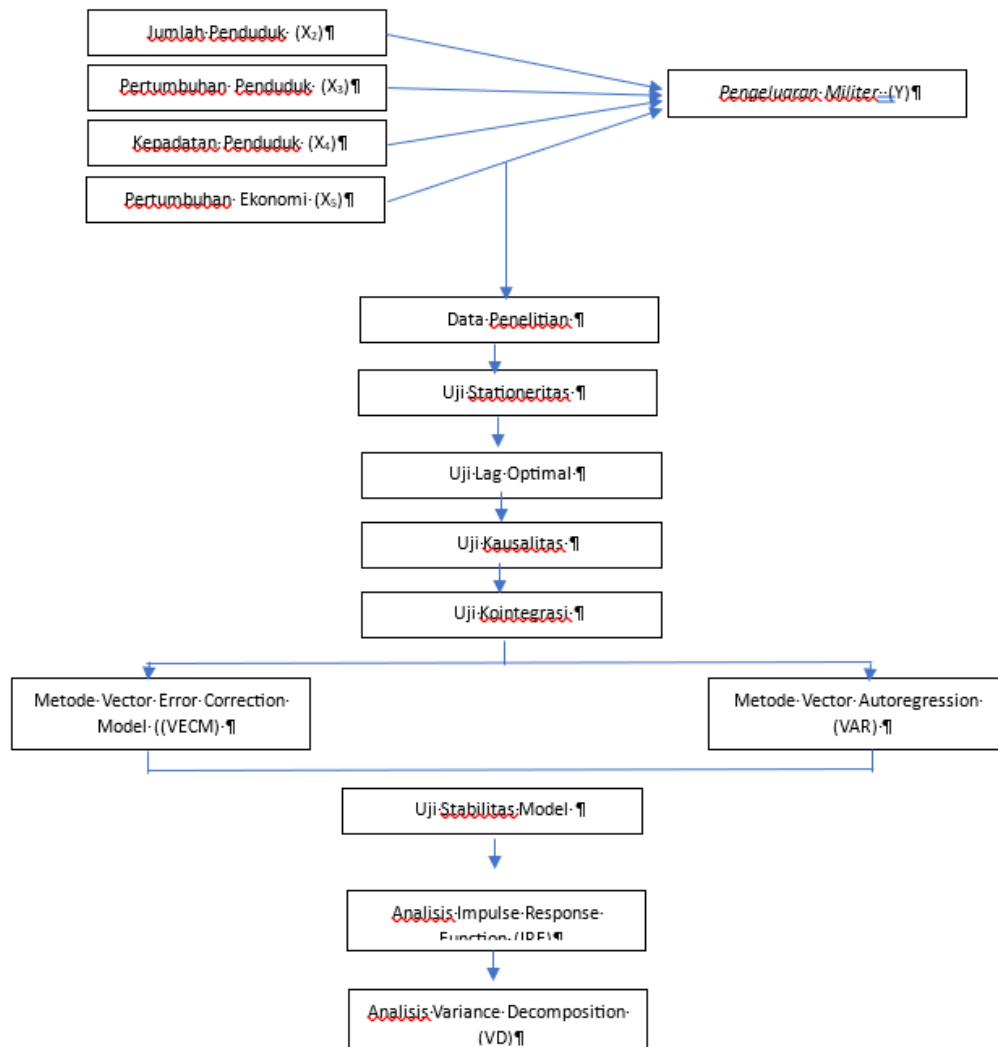
No	NAMA PENELITI/JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara menjadi tidak terealisasikan. Peneliti memberikan rekomendasi dan proyeksi tentang sikap yang harus diambil oleh Indonesia terkait dengan Perjanjian AUKUS di dunia internasional.		

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2023)

Dari pemaparan dan tabel di atas, peneliti menemukan konstelasi beberapa penelitian terdahulu yang dapat menunjang penelitian ini dalam menemukan novelty diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Posma Sariguna Johnson Kennedy (2014), Iman Agung Ramadhan, Agus Tri Basuki (2022), Saskia Tasnim Utami (2022), Tangguh Chairil, Dedy S. Sinaga, Annisa I. Febrianti (2013) dan Jaka Sastrawan Rk, Ming-Hung Yao (2018). Hal tersebut dikarenakan pembahasan dalam penelitian-penelitian terdahulu tersebut adalah *Pengeluaran Militer*, faktor yang mempengaruhi pengeluaran dan anggaran pertahanan, tingkat militerisasi negara ASEAN dengan *Natural Balance Of Power*, ketahanan wilayah Indonesia dalam menghadapi ancaman, dan ruang lingkup ASEAN secara komprehensif.

2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan satu variabel endogen yaitu pengeluaran militer (Y) dan variabel eksogen dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk (X_1), pertumbuhan penduduk (X_2), kepadatan penduduk (X_3) dan pertumbuhan ekonomi (X_4). Paradigma penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Terdapat arah hubungan pengaruh antara :

- Jumlah penduduk (X₁) terhadap pengeluaran militer (Y).
- Pertumbuhan penduduk (X₂) terhadap pengeluaran militer (Y).
- Kepadatan penduduk (X₃) terhadap pengeluaran militer (Y).
- Pertumbuhan ekonomi (X₄) terhadap pengeluaran militer (Y).

H₂ : Dengan model VECM, terdapat hasil hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara :

- a. Jumlah penduduk (X_1) terhadap pengeluaran militer (Y).
- b. Pertumbuhan penduduk (X_2) terhadap pengeluaran militer (Y).
- c. Kepadatan penduduk (X_3) terhadap pengeluaran militer (Y).
- d. Pertumbuhan ekonomi (X_4) terhadap pengeluaran militer (Y).

H₃ : Diduga IRF menunjukkan bahwa arah dari semua respon yang ditimbulkan dari shock menunjukkan respon positif antara :

- a. Jumlah penduduk (X_1) terhadap pengeluaran militer (Y).
- b. Pertumbuhan penduduk (X_2) terhadap pengeluaran militer (Y).
- c. Kepadatan penduduk (X_3) terhadap pengeluaran militer (Y).
- d. Pertumbuhan ekonomi (X_4) terhadap pengeluaran militer (Y).

H₄ : Diduga VD setiap variabel jumlah penduduk (X_1), pertumbuhan penduduk (X_2), kepadatan penduduk (X_3) dan pertumbuhan ekonomi (X_4) memiliki keragaman yang dihasilkan dari kontribusi yang diberikan oleh variabel lain.